

SIMBOLISME POLITIK DAN NARASI KEBERLANJUTAN: STUDI ANALISIS WACANA KRITIS PIDATO PRESIDEN RI KE 7 JOKO WIDODO

Danang Dwi Harmoko¹, Prapti Wigati Purwaningrum²

¹²Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia: danang.dnd@bsi.ac.id

Artikel Info

Received :16 Januari 2025
Reviwe :25 Maret 2025
Accepted :12 April 2025
Published :15 April 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pidato Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. Penelitian ini mengisi gap berupa kurangnya kajian yang membahas bagaimana pidato kenegaraan membentuk legitimasi politik dan narasi keberlanjutan di tengah transisi kekuasaan. Metode yang digunakan mencakup tiga dimensi analisis: (1) analisis teks yang menelaah diksi, repetisi, dan struktur retorik; (2) praktik wacana yang mengeksplorasi proses produksi pidato oleh tim komunikasi presiden dan distribusinya di media; dan (3) praktik sosiokultural yang menempatkan pidato dalam konteks politik transisi. Temuan menunjukkan bahwa pidato menggunakan diksi inklusif ("kita", "bersama") dan repetisi untuk memperkuat citra keberhasilan pemerintah dan kesinambungan kebijakan. Strategi retorik ini berfungsi membentuk opini publik yang mendukung stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kekuasaan di akhir masa jabatan. Penelitian ini berkontribusi pada studi wacana politik dengan menunjukkan bahwa pidato kenegaraan bukan hanya laporan pencapaian, melainkan instrumen politik strategis untuk mengatur persepsi publik dan memastikan kesinambungan kekuasaan di tengah dinamika politik

Kata Kunci: Symbolisme Politik; Pidato; Wacana Kritis; Relasi Kuasa; Opini Publik

A. PENDAHULUAN

Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, rakyat Indonesia menantikan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. Pidato ini bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan

sebuah momentum penting untuk merefleksikan capaian pemerintahan, merancang visi masa depan, dan memperkuat kepercayaan publik. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidato

kenegaraannya di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, terutama dalam masa transisi kepemimpinan (Saputra et al., 2022). Pidato ini tidak hanya menjadi alat komunikasi politik, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun legitimasi kekuasaan dan memastikan keberlanjutan kebijakan di tengah ketidakpastian politik.

Dalam konteks politik Indonesia yang terus berkembang, pidato kenegaraan berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat (Shogan & Neale, 2012). Melalui pemilihan kata dan penyampaian narasi, pidato ini dapat membentuk opini publik, mengukuhkan identitas nasional, serta menciptakan kesan stabilitas di tengah berbagai tantangan politik dan ekonomi (Xu & Zhao, 2023). Dengan semakin kompleksnya tantangan global dan domestik, penting untuk memahami bagaimana pidato ini disusun, disebarluaskan, dan diterima oleh masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada isi pidato, tetapi juga pada proses produksi dan dampak wacana yang dihasilkan.

Pidato Presiden Joko Widodo memiliki ciri khas yang mencerminkan pendekatan komunikasinya yang unik dan efektif. Salah satu karakteristik utama adalah penggunaan gaya bahasa klimaks, di mana ide atau gagasan disusun secara bertahap menuju puncak penekanan (Saputra et al., 2022). Selain itu, ditemukan pula penggunaan gaya bahasa antiklimaks, paralelisme, antitesis, repetisi, asindeton, dan polindeton. Menariknya, gaya bahasa hiperbol jarang digunakan dalam pidato-pidatonya (Faturahman & Muflih, 2022).

Dari segi kohesi dan koherensi, pidato Presiden Joko Widodo menunjukkan

penggunaan kohesi gramatikal seperti referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi, serta kohesi leksikal seperti repetisi, sinonim, antonim, dan homonim. Koherensi dalam pidatonya tercermin melalui hubungan sebab-akibat, alasan-sebab, sarana-hasil, syarat-hasil, dan perbandingan, yang semuanya berkontribusi pada keutuhan dan keterpaduan wacana.

Analisis retorika terhadap pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 mengungkap bahwa pidato tersebut memenuhi lima hukum retorika Aristoteles, yang mencakup penyusunan pidato secara sistematis dan efektif. Hal ini menunjukkan kemampuan beliau dalam menyampaikan pesan secara persuasif dan terstruktur kepada audiens (Faturahman & Muflih, 2022).

Dalam konteks pidato kenegaraan terakhir pada sidang tahunan MPR 2024, analisis semiotika menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo secara efektif menyampaikan pesan emosional yang mencakup permohonan maaf, penyampaian prestasi, dan harapan untuk kepemimpinan di masa mendatang. Penggunaan tanda-tanda dalam pidato tersebut mencerminkan kedalaman makna dan strategi komunikasi yang matang.

Selain itu, pidato Presiden Joko Widodo sering kali menekankan ideologi populis dan nasionalisme (Saputra et al., 2022). Beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja keras menghadapi tantangan dan melakukan lompatan dalam berbagai bidang guna mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju. Hal ini mencerminkan komitmen beliau terhadap pemberdayaan rakyat dan kemajuan bangsa.

Penggunaan modalitas dalam pidato-pidato Presiden Joko Widodo juga menarik untuk dicermati. Beliau menggunakan berbagai jenis modalitas, seperti personal, deduktif, dan evaluatif, untuk menegaskan

komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif. Strategi ini menunjukkan kecerdasan dalam memilih bahasa yang meyakinkan dan mampu mempengaruhi pendengar dalam forum internasional (Faturahman & Muflih, 2022).

Kajian sebelumnya banyak menyoroti aspek linguistik dan retorik dalam pidato kenegaraan. (Holubovska, 2024) menyoroti kecenderungan pemimpin di negara berkembang untuk menampilkan pencapaian idealistik guna mempertahankan dukungan politik. Sementara itu, (Firmansyah et al., 2023) meneliti bagaimana pidato kenegaraan membangun narasi stabilitas di tengah transisi kekuasaan. Meski memberikan wawasan berharga, studi-studi tersebut belum secara menyeluruh membahas interaksi antara produksi wacana, distribusi pesan, dan penerimaannya oleh publik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih luas, menghubungkan bahasa dengan kekuasaan, serta strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik.

Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh (Fairclough, 2013b, 2013a) menjadi kerangka kerja utama dalam penelitian ini. Bahasa dalam pidato kenegaraan bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium untuk membentuk realitas sosial dan politik. Dengan tiga level analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pidato Presiden Jokowi dikonstruksi sebagai alat retorik yang mendukung narasi keberlanjutan kebijakan. Penggunaan diksi inklusif seperti “kita” dan “bersama” misalnya, menjadi strategi untuk menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan adalah hasil kerja kolektif. Begitu pula dengan penyebutan data konkret, seperti penurunan angka

kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, yang tidak hanya mengukuhkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memberikan kesan kredibilitas terhadap kepemimpinan.

Selain konten pidato itu sendiri, penelitian ini juga menelaah bagaimana media berperan dalam mendistribusikan dan membingkai wacana politik. (King et al., 2017) menyoroti bagaimana media dapat menginterpretasikan dan menyebarkan pesan politik sesuai dengan agenda mereka. Dalam konteks pidato Presiden Jokowi, media yang mendukung pemerintah cenderung menyoroti aspek keberhasilan dan kesinambungan kebijakan, sedangkan media yang lebih kritis mungkin mengangkat celah atau perbedaan antara retorika dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, media tidak sekadar sebagai perantara informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam membentuk opini publik (Yunanto et al., 2024).

Lebih jauh, penelitian ini menelaah bagaimana pidato kenegaraan disusun secara internal dalam pemerintahan. Pidato Presiden tidak hanya hasil pemikiran individu, tetapi merupakan produk kolektif yang melibatkan tim komunikasi, ahli strategi politik, dan penasihat kebijakan. Kolaborasi ini memastikan bahwa pidato yang disampaikan tidak hanya memiliki bobot linguistik yang kuat, tetapi juga dirancang untuk menimbulkan resonansi emosional yang efektif di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman mengenai bagaimana sebuah pidato diproduksi dan bagaimana pesan tersebut dipersepsi menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Di tengah transisi kepemimpinan yang membawa ketidakpastian, komunikasi politik yang efektif menjadi krusial untuk menjaga stabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh

(Wodak, 2024) dan (Zhang, 2023), pidato politik memiliki peran dalam membangun ingatan kolektif dan legitimasi kekuasaan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana wacana dalam pidato kenegaraan didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang heterogen. Dengan menggunakan pendekatan intertekstual dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap dinamika komunikasi politik di Indonesia.

Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini menawarkan dua aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran bahasa dalam membentuk kekuasaan politik melalui pidato kenegaraan. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi praktisi komunikasi politik dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, terutama dalam masa transisi kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik yang memperkaya studi wacana politik, tetapi juga menjadi referensi yang dapat diaplikasikan dalam dunia nyata, baik oleh pemerintah, media, maupun masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana bahasa membentuk persepsi dan legitimasi dalam politik Indonesia.

B.METODE

Penelitian ini menerapkan analisis wacana kritis (AWK) dengan model Fairclough untuk mengkaji pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79. Model ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antara teks, produksi wacana, dan konteks sosial-politik. Berbeda dengan pendekatan (van Dijk, 2008) yang lebih berfokus pada aspek kognitif dan model Wodak yang

menekankan pendekatan historis, model Fairclough memungkinkan eksplorasi lebih komprehensif terhadap bagaimana pidato kenegaraan berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan strategi pembentukan opini publik, terutama dalam konteks transisi kepemimpinan.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama: teks resmi pidato serta liputan media dan tanggapan publik di berbagai platform. Pendekatan triangulasi data diterapkan untuk meningkatkan validitas, dengan membandingkan isi pidato, cara media membincangkannya, dan bagaimana masyarakat menginterpretasikannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada wacana yang disampaikan secara eksplisit dalam pidato, tetapi juga dinamika penyebaran dan penerimaannya oleh publik.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, analisis teks mengidentifikasi elemen linguistik seperti diksi inklusif, repetisi, dan metafora pembangunan yang membentuk narasi keberhasilan dan kesinambungan kebijakan. Kedua, analisis praktik wacana menelaah produksi dan distribusi pidato, termasuk peran tim komunikasi dalam merancang pesan politik serta bagaimana media membincangi dan menyebarkan pidato sesuai dengan agenda masing-masing. Ketiga, analisis praktik sosiokultural menempatkan pidato dalam konteks sosial-politik, menyoroti strategi komunikasi yang digunakan untuk mengukuhkan stabilitas dan mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah dinamika politik.

Pendekatan interpretatif diterapkan dalam setiap tahap analisis guna mengungkap relasi antara bahasa dan kekuasaan. Proses ini dilakukan secara iteratif, dengan hasil yang ditinjau ulang untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan. Dengan mengintegrasikan analisis linguistik,

distribusi wacana, dan konteks sosial-politik, penelitian ini tidak hanya mengkaji struktur teks pidato, tetapi juga bagaimana wacana politik dibentuk, disebarluaskan, dan diterima dalam dinamika sosial-politik yang berkembang.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidato kenegaraan pada peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momen penting bagi pemimpin untuk menyampaikan pencapaian serta visi masa depan bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyentuh berbagai aspek pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi digital, sambil merefleksikan pencapaiannya selama 10 tahun menjabat. Analisis wacana kritis Fairclough akan membantu kita memahami bagaimana wacana ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk dan memperkuat relasi kekuasaan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial.

Dimensi Teks

1. Pilihan Diksi

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memilih kata-kata yang sangat strategis untuk memengaruhi emosi audiens, memperkuat wacana positif tentang pemerintahannya, dan memberikan visi yang optimis bagi masa depan bangsa.

a. Kata-kata Bersifat Kolektif dan Inklusif

Penggunaan kata ganti orang pertama jamak seperti “kita,” “kami,” dan “bersama” mendominasi pidato ini. Tujuan dari penggunaan diksi semacam ini adalah untuk membangun kesan kesatuan antara pemerintah dan rakyat. Dengan kata-kata tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pencapaian selama 10 tahun pemerintahannya adalah hasil kerja kolektif antara pemimpin dan masyarakat.

Contoh:

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama.”

“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023.”

Diksi ini berfungsi untuk menciptakan narasi bahwa keberhasilan yang diraih bukanlah hasil dari satu orang atau satu lembaga, tetapi dari keseluruhan bangsa Indonesia. Ini adalah strategi retorik untuk menyatukan rakyat dengan pemerintah serta memperkuat rasa kebanggaan nasional.

b. Penggunaan Kata-kata Positif dan Optimistis

Jokowi juga menggunakan diksi positif untuk menegaskan pencapaian dan kemajuan yang telah diraih selama masa pemerintahannya. Kata-kata seperti “berhasil,” “membangun,” “kemajuan,” “menggapai,” dan “meningkatkan” muncul secara berkala untuk menciptakan kesan kesuksesan dan optimisme terhadap masa depan.

Contoh:

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru...”

“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.”

Penggunaan kata-kata ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa di tengah berbagai tantangan global dan domestik, pemerintah Jokowi berhasil membuat kemajuan yang signifikan dan berhasil membawa bangsa ke tingkat yang lebih baik.

c. Pilihan Kata dengan Makna Relasional

Jokowi juga menggunakan kata-kata yang memperkuat relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, ia sering kali menekankan posisi rakyat sebagai

penerima manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah dengan kata-kata seperti “untuk rakyat,” “kesejahteraan rakyat,” dan “kepentingan rakyat.”

Contoh:

“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini... dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Diksi ini tidak hanya menyampaikan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, tetapi juga menciptakan kesan bahwa kebijakan dan program pemerintah dibuat secara khusus untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ini memperkuat relasi antara rakyat sebagai subyek yang harus dilindungi dan pemerintah sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan.

2. Gaya Bahasa

Gaya bahasa dalam pidato ini penuh dengan penggunaan retorika klasik yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens secara emosional dan rasional.

a. Repetisi

Repetisi digunakan secara strategis untuk memperkuat poin-poin penting dan meningkatkan efek persuasi. Salah satu bentuk repetisi yang sering muncul adalah penggunaan kalimat yang dimulai dengan “Sehingga...” atau “Kita...” yang menegaskan rangkaian hasil dari kebijakan pemerintah.

Contoh:

“Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik...”

“Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing...”

“Sehingga, kita mampu memperkuat persatuan...”

Pengulangan ini berfungsi untuk menekankan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemerintah dan hasil yang dicapai. Secara retorik, repetisi menciptakan ritme

dalam pidato yang mempermudah audiens untuk mengikuti alur logika yang disampaikan.

b. Metafora dan Simbolisme

Pidato ini juga menggunakan simbolisme dan metafora untuk menggambarkan pembangunan sebagai proses yang tidak hanya fisik, tetapi juga simbolik. Contoh yang paling menonjol adalah ketika Jokowi menyebut “fondasi” sebagai simbol kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintahannya.

Contoh:

“Ini adalah fondasi besar kita bersama.”

Kata “fondasi” di sini digunakan sebagai metafora untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sosial yang telah dilakukan pemerintah selama 10 tahun. Fondasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar fisik, tetapi juga dasar simbolik bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

c. Paralelisme

Penggunaan struktur paralel juga terlihat dalam beberapa bagian pidato untuk memperkuat ritme dan daya persuasi. Salah satu contoh adalah penggunaan pola kalimat yang sama untuk menyoroti berbagai pencapaian pemerintah.

Contoh:

“Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat... Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar... Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan...”

Struktur yang paralel ini memberikan konsistensi dan meningkatkan daya tarik retorik pidato, karena pola-pola yang berulang lebih mudah diingat oleh audiens.

3. Struktur Pidato

Struktur pidato Jokowi mengikuti pola yang terencana dan memiliki alur yang jelas. Hal ini sangat penting untuk mengatur wacana dan mengarahkan audiens melalui berbagai poin penting yang ingin disampaikan.

a. Pembukaan: Refleksi dan Apresiasi

Pidato dibuka dengan refleksi tentang perjalanan 10 tahun pemerintahannya dan peran rakyat dalam kesuksesan yang dicapai. Ini adalah bagian yang sarat dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada rakyat Indonesia.

Contoh:

“Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus.”

Dengan membuka pidato dengan refleksi dan apresiasi, Jokowi menciptakan suasana yang penuh hormat dan merendah. Ini membantu menciptakan hubungan emosional antara dirinya dan audiens.

b. Isi: Pencapaian dan Tantangan

Bagian inti dari pidato adalah penyajian data pencapaian pemerintah. Jokowi memanfaatkan angka-angka konkret untuk memperkuat argumen bahwa pemerintahannya telah berhasil membawa kemajuan signifikan di berbagai sektor.

Penyajian data ini bukan hanya untuk menunjukkan hasil kerja, tetapi juga untuk memperkuat narasi bahwa pemerintah telah berhasil memenuhi janji-janji sebelumnya.

c. Penutupan: Visi Masa Depan dan Penyerahan Kepemimpinan

Pidato diakhiri dengan pesan optimisme dan penyerahan tongkat estafet kepada presiden terpilih. Bagian ini sangat penting dalam konteks politik, karena menandakan akhir kepemimpinan Jokowi dan transisi kekuasaan yang damai.

Contoh:

“Kepada Presiden Terpilih, Bapak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan.”

Bagian penutupan ini mengandung simbolisme transisi yang lancar dan memberikan kesan bahwa Jokowi telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, serta

percaya bahwa pembangunan akan berlanjut di bawah kepemimpinan baru.

4. Strategi Retoris

Selain elemen-elemen linguistik yang telah dibahas, Jokowi juga menggunakan strategi retorik tertentu untuk memengaruhi pendengarnya.

a. Etos (Kredibilitas)

Jokowi membangun etos dengan menekankan pencapaian selama 10 tahun masa jabatannya. Pencapaian ini dikemas dalam bentuk data dan angka yang konkret, yang memberikan kesan bahwa pemerintahannya berbasis pada hasil nyata.

b. Pathos (Emosi)

Penggunaan ucapan terima kasih, permintaan maaf, serta harapan untuk masa depan memainkan peran penting dalam menarik emosi audiens. Ketika Jokowi meminta maaf kepada rakyat, ia secara efektif merendahkan dirinya, yang meningkatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.

c. Logos (Logika)

Jokowi menggunakan logos dengan memaparkan argumen yang logis dan berbasis data. Pencapaian seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur semuanya disajikan dengan statistik untuk memperkuat narasi pemerintahannya yang sukses.

Pidato Presiden Jokowi menggunakan berbagai teknik linguistik dan retorik untuk menciptakan wacana politik yang kuat. Dengan pilihan diksi yang inklusif, penggunaan repetisi, dan struktur pidato yang terencana, Jokowi berhasil membangun narasi keberhasilan pemerintahannya, sekaligus menciptakan visi optimis tentang masa depan Indonesia.

Praktik Wacana

1. Proses Produksi

Proses produksi teks melibatkan pembuatan wacana, yang mencakup peran berbagai aktor dan institusi di belakang teks tersebut, serta strategi-strategi komunikasi yang digunakan untuk memproduksi pesan yang diinginkan.

a. Produksi Pidato sebagai Produk Kolektif

Pidato kenegaraan seperti ini bukanlah hasil dari satu individu, meskipun pidato tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sebaliknya, pidato ini merupakan produk kolektif yang dihasilkan oleh berbagai aktor dalam struktur pemerintah. Tim penulis pidato, ahli strategi politik, serta penasihat kebijakan berperan dalam merumuskan pidato yang tidak hanya mencerminkan pandangan Jokowi sebagai presiden, tetapi juga mencerminkan agenda dan kepentingan yang lebih luas dari pemerintah.

Beberapa elemen yang terlibat dalam proses produksi ini antara lain:

Tim Penulis Pidato: Mereka bertugas menyusun kata-kata, frasa, dan struktur pidato yang dapat mengomunikasikan pesan pemerintah dengan jelas dan efektif.

Pakar Kebijakan: Para ahli kebijakan turut berperan dalam memberikan data dan fakta yang mendukung isi pidato. Mereka memastikan bahwa pidato tersebut memiliki dasar yang kuat dalam kebijakan publik yang dihasilkan selama masa pemerintahan Jokowi.

Ahli Komunikasi: Mereka membantu membentuk strategi komunikasi yang efektif, memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan audiens yang beragam dan dapat diterima secara luas.

b. Wacana yang Terstruktur Sesuai Agenda Politik

Pidato ini dihasilkan dengan mempertimbangkan konteks politik, yaitu tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Ini

merupakan pidato kenegaraan terakhir Jokowi sebagai presiden sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada presiden terpilih, sehingga struktur dan isinya sangat strategis. Pidato ini didesain untuk:

Meninggalkan Warisan Positif: Jokowi ingin meninggalkan warisan yang kuat tentang pencapaiannya selama 10 tahun masa kepemimpinan. Dengan menekankan infrastruktur yang telah dibangun, perbaikan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, pidato ini berfungsi untuk menciptakan narasi kesuksesan yang akan menjadi bagian dari memori kolektif tentang kepemimpinannya.

Mempertahankan Stabilitas Politik: Menjelang transisi kekuasaan, pidato ini bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa proses transisi kepemimpinan berlangsung dengan damai dan terencana. Dengan menyebut presiden terpilih secara langsung, Jokowi berusaha memperkuat kesan stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

c. Wacana yang Sesuai dengan Gaya Kepemimpinan Jokowi

Dalam proses produksi, gaya komunikasi Jokowi juga sangat dipertimbangkan. Jokowi dikenal dengan gaya komunikasinya yang sederhana, lugas, dan dekat dengan rakyat. Pidato ini mencerminkan gaya tersebut, di mana Jokowi lebih sering menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari bahasa yang terlalu formal atau kompleks.

Contoh kalimat seperti “Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf” menunjukkan bagaimana Jokowi memilih pendekatan yang merendah, menggunakan bahasa yang langsung dan tidak berbelit-belit. Ini sejalan dengan citra Jokowi sebagai pemimpin yang “dekat” dengan rakyat dan selalu mengedepankan pendekatan yang humanis.

d. Konteks Global dan Regional

Proses produksi pidato ini juga dipengaruhi oleh konteks internasional, seperti dampak pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik global, serta perubahan iklim. Misalnya, Jokowi menyoroti bagaimana Indonesia berhasil mengatasi pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang besar. Ini memperlihatkan bahwa pidato ini juga disusun dengan mempertimbangkan bagaimana Indonesia ingin dilihat di mata dunia, yaitu sebagai negara yang tangguh dan mampu bertahan di tengah krisis global.

2. Proses Konsumsi

Setelah teks diproduksi, kita harus melihat bagaimana teks tersebut dikonsumsi oleh audiens, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini, proses konsumsi berkaitan dengan bagaimana audiens menerima, memahami, dan merespon pidato tersebut.

a. Konsumsi oleh Berbagai Segmen Masyarakat

Pidato kenegaraan ini dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, hingga masyarakat umum. Setiap kelompok audiens memiliki cara yang berbeda dalam mengonsumsi pidato tersebut:

Pejabat Pemerintah dan Lembaga Negara: Bagi pejabat negara dan lembaga seperti DPR, MPR, dan DPD, pidato ini memberikan petunjuk tentang prioritas kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah dan memberikan sinyal tentang arah kebijakan ke depan. Pidato ini juga berfungsi untuk mengonsolidasikan dukungan politik, terutama dengan apresiasi yang diberikan Jokowi terhadap kerja lembaga-lembaga negara tersebut.

Masyarakat Umum: Bagi masyarakat umum, pidato ini adalah kesempatan untuk

mengevaluasi kinerja Jokowi selama 10 tahun menjabat. Data empiris yang disajikan dalam pidato bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik. Bagi masyarakat kelas bawah, data tentang program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan sangat penting karena menyentuh langsung kehidupan mereka. Ini berfungsi untuk memperkuat dukungan dari lapisan masyarakat yang telah merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah.

b. Konsumsi oleh Media

Media memainkan peran penting dalam mendistribusikan dan membingkai pidato ini. Media tidak hanya melaporkan pidato secara keseluruhan, tetapi juga menyoroti bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Misalnya, media mungkin memfokuskan perhatian pada pencapaian infrastruktur atau keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Di sini, media juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, karena mereka menafsirkan dan menguraikan pidato untuk konsumsi publik yang lebih luas. Berbagai outlet media mungkin memiliki agenda masing-masing, sehingga interpretasi mereka terhadap pidato bisa beragam. Media yang pro-pemerintah cenderung membingkai pidato ini sebagai keberhasilan besar, sementara media yang lebih kritis mungkin menyoroti kekurangan atau hal-hal yang belum tercapai.

c. Konsumsi di Luar Negeri

Selain audiens domestik, pidato ini juga dikonsumsi oleh audiens internasional, terutama oleh negara-negara tetangga, investor asing, dan mitra dagang Indonesia. Dalam hal ini, Jokowi menggunakan wacana ekonomi dan diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Misalnya, ketika Jokowi menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap stabil di tengah krisis global, ia secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang layak untuk dijadikan mitra ekonomi. Wacana mengenai transisi energi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam agenda hijau global, yang menjadi perhatian penting bagi negara-negara maju dan organisasi internasional.

d. Konsumsi oleh Kalangan Akademis dan Analis Politik

Di samping media dan masyarakat umum, pidato ini juga menjadi objek analisis bagi akademisi, peneliti, dan analis politik. Kalangan ini mengkonsumsi pidato dalam konteks yang lebih kritis, menilai seberapa jauh janji-janji yang disampaikan sesuai dengan realitas. Mereka juga mungkin menyoroti bagian-bagian pidato yang dirasa tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial-politik atau ekonomi yang ada.

Sebagai contoh, para akademisi mungkin mempertanyakan efektivitas beberapa program sosial yang disebutkan dalam pidato, atau mereka mungkin membandingkan pencapaian ekonomi yang disampaikan dengan data independen dari sumber lain. Konsumsi kritis ini penting dalam memastikan bahwa wacana yang disampaikan pemerintah diuji secara objektif dan tidak hanya diterima begitu saja.

3. Praktik Wacana dalam Konteks Sosial dan Politik

Pada level praktik wacana, pidato kenegaraan ini harus dipahami dalam konteks sosial dan politik Indonesia yang lebih luas. Pidato Jokowi pada dasarnya merupakan cerminan dari dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari upaya legitimasi

pemerintah dalam mempertahankan dan membangun dukungan publik.

a. Kontestasi Wacana

Meskipun pidato ini disampaikan oleh presiden, bukan berarti wacana yang disampaikan tidak akan mendapat tantangan. Dalam konteks demokrasi, wacana politik selalu berada dalam posisi kontestasi. Partai oposisi, kritikus pemerintah, dan media yang kritis mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai pencapaian yang disampaikan. Mereka mungkin akan menyoroti aspek-aspek yang tidak dibahas dalam pidato, atau mengkritik kebijakan yang dinilai tidak efektif.

Sebagai contoh, isu seperti penegakan hukum atau korupsi yang tidak terlalu dibahas secara mendalam dalam pidato mungkin akan diangkat oleh pihak-pihak yang menantang wacana resmi pemerintah.

b. Legitimasi Kekuasaan

Pidato ini juga merupakan bagian dari praktik wacana yang lebih luas dalam menjaga legitimasi kekuasaan pemerintah. Dengan menekankan pada pencapaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta keberhasilan dalam mengelola krisis, Jokowi berusaha untuk memperkuat citra pemerintah sebagai aktor yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Praktik Sosiokultural

Dimensi terakhir adalah analisis konteks sosiokultural. Pidato ini disampaikan dalam konteks tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, di mana ia perlu memastikan bahwa kebijakan dan pencapaiannya akan diingat secara positif, baik oleh masyarakat maupun sejarah.

a. Konteks Politik

Secara politik, pidato ini menekankan kesinambungan. Dengan menyebutkan presiden terpilih Prabowo Subianto di akhir pidatonya, Jokowi secara simbolis menunjukkan kesediaannya untuk

menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dengan damai dan lancar. Ini adalah momen yang penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah-tengah proses transisi yang sering kali menjadi momen kritis dalam sebuah demokrasi.

b. Konteks Ekonomi

Pidato ini juga disampaikan di tengah-tengah berbagai tantangan ekonomi global, seperti dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina. Namun, Jokowi dengan cermat menekankan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, seperti:

Pertumbuhan ekonomi yang tetap di kisaran 5% meski negara lain stagnan atau mengalami penurunan.

“Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh.”

Wacana ekonomi ini ditekankan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal, dan fondasi ekonomi Indonesia telah diletakkan dengan baik untuk menghadapi tantangan ke depan.

c. Konteks Sosial

Jokowi juga menyoroti berbagai isu sosial yang menjadi prioritas selama pemerintahannya, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Penekanan pada angka-angka ini, serta pencapaian di bidang infrastruktur dan digitalisasi, menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di berbagai level.

Jokowi menutup pidatonya dengan refleksi yang sangat personal, mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi menegaskan keyakinannya bahwa dengan "persatuan dan kerja sama," bangsa ini bisa terus melangkah maju.

Dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough, kita bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi menggunakan wacana untuk membangun narasi kesuksesan, legitimasi politik, dan kesinambungan di tengah transisi kekuasaan. Pidato ini dirancang dengan hati-hati untuk memperkuat persepsi positif terhadap masa jabatannya dan memastikan dukungan publik terhadap arah kebijakan yang telah ia tetapkan. Penggunaan bahasa inklusif, data empiris, serta narasi tentang masa depan cerah semuanya menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang dirancang untuk menciptakan stabilitas, optimisme, dan harapan bagi Indonesia di masa depan.

D.SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 membentuk wacana yang kuat terkait keberhasilan pemerintahannya selama satu dekade. Berdasarkan analisis wacana kritis model Fairclough, pidato ini menggunakan strategi retorik dan linguistik yang bertujuan memperkuat citra kepemimpinan Jokowi, termasuk penggunaan diksi inklusif seperti "kita" dan "bersama" yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan pencapaian nasional. Pidato ini juga memanfaatkan data kuantitatif terkait pembangunan infrastruktur, penurunan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti empiris yang memperkuat legitimasi kekuasaan. Selain menegaskan keberhasilan, pidato ini membingkai narasi kesinambungan kebijakan di tengah transisi kepemimpinan, terutama dalam sektor hilirisasi dan pembangunan ekonomi hijau. Dukungan eksplisit kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, memperkuat kesan transisi kekuasaan yang damai dan stabil, sekaligus menegaskan

keberlanjutan arah kebijakan nasional.

Implikasi hasil penelitian ini terhadap studi wacana politik di Indonesia menunjukkan bahwa pidato kenegaraan berperan sebagai alat strategis dalam membangun dan mempertahankan legitimasi politik di tengah dinamika transisi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam pidato kenegaraan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengkonstruksi citra kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan di hadapan audiens domestik dan internasional. Selain itu, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana wacana politik diproduksi secara kolektif oleh aktor-aktor di balik pidato, didistribusikan melalui media, dan dikonsumsi oleh publik yang beragam. Dengan menganalisis tiga dimensi wacana (teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural), penelitian ini memperkuat argumen bahwa pidato kenegaraan memiliki kapasitas untuk memengaruhi persepsi publik dan membentuk konsensus politik yang menguntungkan pihak berkuasa.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana wacana politik dalam pidato kenegaraan berkembang seiring waktu dalam berbagai periode pemerintahan. Penelitian komparatif antara pidato-pidato kenegaraan di masa pemerintahan yang berbeda dapat memberikan wawasan mengenai pola komunikasi politik dan pergeseran strategi legitimasi kekuasaan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan menggunakan pendekatan multimodal untuk mengkaji bagaimana elemen visual (misalnya, ekspresi tubuh dan penggunaan simbol negara) dalam penyampaian pidato turut memperkuat atau memodifikasi makna wacana politik yang disampaikan. Studi

lebih lanjut juga dapat memperhatikan bagaimana audiens dari berbagai latar belakang sosial dan politik merespons pidato kenegaraan secara berbeda, yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas strategi retorik dalam membentuk opini publik dan memperkuat kekuasaan di era digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, N. (2013a). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Fairclough, N. (2013b). *Language and Power*. Routledge.
- Faturahman, I., & Muflih, R. (2022). Analisis Retorika Dalam Pidato Presiden Joko Widodo Pada Pelantikan Presiden Tahun 2019 Di Channel Youtube Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia. *Pantarei*, 6(1).
- Firmansyah, M. F., Maulana, H. Z., Nuraini, S. R., & Ridho, M. (2023). The Role Of Gdp Per Capita, Economic Freedom Index And Population Growth To Political Stability In Southeast Asian Countries. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 2(2), 97–117.
<https://doi.org/10.15642/sarpass.2023.2.2.97-117>
- Holubovska, I. (2024). PRESIDENTIAL Inaugural Speech As A Discursive Manifestation Of Ideologemes Reflecting Social And Political Values. *Movoznavstvo*, 336(3), 75–86.
<https://doi.org/10.33190/0027-2833-336-2024-3-005>
- King, G., Schneer, B., & White, A. (2017). How the news media activate public expression and influence national agendas. *Science*, 358(6364), 776–780.
<https://doi.org/10.1126/science.aao1100>

- Saputra, E., Muhammad Saleh, M., & Maria, H. E. (2022). Gaya Bahasa Dalam Teks Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 68. <https://doi.org/10.26858/indonesia.v1i2.13162>
- Shogan, C. J., & Neale, T. H. (2012). *The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications*.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Cambridge University Press.
- Wodak, R. (2024). Critical Discourse Analysis/Studies. In *The Routledge Companion to English Studies* (pp. 31–44). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003221265-4>
- Xu, Y., & Zhao, J. (2023). The power of history: How a victimization narrative shapes national identity and public opinion in China. *Research & Politics*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/20531680231154837>
- Yunanto, F., Kasanova, K., Rudiyanto, M., & Haqiqi, M. N. (2024). Wacana Kritis Tentang Konstruksi Narasi Media dan Persepsi Mahasiswa Pada Pemilu Presiden 2024 di Universitas Madura. *JURNALISTRENDI : JURNAL LINGUISTIK, SASTRA, DAN PENDIDIKAN*, 9(2), 310–317. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v9i2.2259>
- Zhang, X. (2023). Study on Approaching Critical Discourse Analysis. *Journal of Education Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/ehss.v7i.3998>